

Jatinangor: Pendidikan Terbatas bagi Orang Dengan Disabilitas



Windi orang dengan disabilitas fisik | foto: Tasya Fadila

Suherman adalah ayah dari tiga anak dengan disabilitas fisik, dua anaknya lainnya telah pergi mendahului nya. Anak yang akan kita bicarakan adalah Windi, si bungsu, perempuan yang berteman baik dengan kursi roda.

“Belum, belum sekolah *neng*. Soalnya di sini gak ada sekolah yang khusus gitu. Khusus anak-anak di sini gak ada. Pengen sekolah ini juga, tapi ya...” kata sang ibu

“Sekolah ya? SLB, SLBnya harus D. Ada di Cibiru, itu gratis punya negara, tapi keluarnya untuk angkutan, jadi harus punya kendaraan pribadi, masing-masing gitu.” lanjut Suherman.

“Ada, antar jemput tapi bayar. Itu salahnya, harusnya dikritik pemerintah itu, itu ada anggaranya *kok* ke mana? Untuk angkutan mobil yang gini aja ngga ada. Itu Sekolah mewah punya negara, gratis semua, *kok* jemputan aja ngga ada? Jadi kan orang mesti

orang kaya, atau *make* angkot. Kalo naik ojek kan lebih bahaya” Lanjut ia dengan geram.

Di usia yang sudah menyentuh kepala tiga ini, Windi tidak pernah sekolah. Bukan karena tidak mau, tetapi aksesnya yang sulit dan tak tergapai.

Tidak hanya Windi, ada juga Shafa Nabilah, anak dengan disabilitas fisik karena gizi buruk yang menyimpannya. Karena ini, tumbuh kembang fisiknya tak sesuai dengan usianya.

“Ada, waktu itu di SD Negeri Bojongloa, setelah konfirmasi dari pihak sekolah adalah usia dan fisiknya harus seimbang, kalo usianya 7 tahun jadi fisiknya juga seimbang usia 7 tahun, jadi Shafa tidak bisa sekolah formal terakreditasi di Bojongloa karena usianya tidak sebanding dengan fisiknya.” kata Yudi, ayah Shafa.

#1. Orang Dengan Disabilitas di Jatinangor

Di website e-officedesa Sumedang, terdapat 772 orang dengan disabilitas di Kecamatan Jatinangor. Namun, data di Kecamatannya, hanya ada 287 orang dengan disabilitas. Mayoritas dari mereka adalah orang dengan disabilitas fisik, sehingga membutuhkan infrastruktur yang baik.

#2. Akses Pendidikan di Jatinangor

Di luar dari data tersebut, Jatinangor hanya memiliki satu Sekolah Luar Biasa (SLB), yaitu SLB BC Fadhilah. Sekolah khusus yang melayani anak dengan disabilitas sensorik telinga dan intelegensi rendah.

Sekolah yang berlokasi di Cipacing ini dikelola oleh swasta. Dengan cat cerah, suasana yang ramah, seolah tanpa masalah.

Berdiri di tanah seluas 252 m², sekolah ini melayani anak didik dari tingkat SD hingga SMA, memiliki 58 murid, dengan 12 guru berstatus honorer.

Pembelajarannya menggunakan kurikulum yang fleksibel, mengacu pada kurikulum 2013, mengajarkan IPA, IPS, Matematika, dan mata pelajaran umum lainnya.

Perbedaannya, tujuan utama pembelajaran sekolah ini adalah bina diri, komunikasi, serta berbagai keterampilan, seperti melukis, menjahit, kesenian, dan olahraga, agar mereka bisa bertahan hidup. Nilai akademik bukanlah prioritas.



Anak-anak disabilitas sensorik telinga sedang latihan modeling untuk penutupan pesantren kilat | foto: Raisa Adzraa

Biaya bukanlah masalah jika ingin masuk ke sekolah ini. “Kalau dari nominal ga ada yang tetap bahkan ada yang gratis, hampir 50% gratis.” kata Bu Widya, Kepala Sekolah SLB BC Fadhilah, ketika ditanya mengenai biaya.

Sekolah memang menentukan biaya perbulan, tidak lebih dari lima puluh ribu. Mereka mengerti, karena mayoritas siswa di Jatinangor memiliki kondisi ekonomi menengah ke bawah.

“Anak sekolah bukan untuk bisa baca, menulis, atau berhitung, tapi minimal anak bisa mandiri.” Lanjut Widya.

#3. Pentingnya Pendidikan

Suasana di SLB BC Fadhilah ini sangat menyenangkan, setidaknya bagi Ina Kartina, guru yang telah mengajar selama 19 tahun. Kunci keberhasilan mengedukasi anak dengan disabilitas adalah kerjasama dengan orang tua.

“Kita ga semata-mata menangani anak karena ada ilmu. Padahal kan prakteknya lebih hebat orang tua dibandingkan dengan gurunya. Makanya kita harus ada kerja sama antara guru dan orang tua” kata Bu Ina.

Kebaikan guru-guru di SLB BC Fadhilah membuahkan hasil. Ali, pengidap *down syndrome* kini dapat berkomunikasi dua arah. “Kalo ada tamu datang, ngasih tau gitu ke ibu. Perkembangannya bagus.” kata sang ibunda.

Perkembangan juga terjadi pada Shafa, anak berusia 13 tahun yang memiliki intelegensi rendah. Kata ibunya, dulu ia sering tantrum, membenturkan kepala, dan menyiksa diri. Setelah sekolah, hal ini berkurang dan tidak pernah terjadi lagi.

Selain Ali dan Shafa, ada juga Diki yang pernah pergi ke Yunani untuk lomba basket di bawah naungan SOIna (Special Olympics Indonesia). Meskipun sudah sampai ke Yunani, ia tidak mendapatkan banyak apresiasi dari pemerintah, hadiahnya hanya bisa membantu memperbaiki rumah orangtuanya saja, tidak lebih dan tidak ada kelanjutannya.

#4. Ketimpangan yang Ada

Cerita di atas adalah cerita dari orang-orang yang berhasil mendapatkan manfaat dari pendidikan formal.

Namun, bagaimana dengan anak-anak disabilitas lain? Anak disabilitas sensorik mata, fisik, mental, atau bahkan anak dengan disabilitas ganda. Ke mana mereka harus pergi?

Seperti Windi dan Shafa Nabila yang tidak bisa sekolah di lembaga pendidikan formal, tidak menutup kemungkinan ada anak lain yang bernasib sama.

Padahal, negara sudah membuat banyak payung hukum mengenai pendidikan. Setidaknya, ada tiga peraturan, yaitu pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.”

Lalu, Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 12: “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”.

Dan Pasal 60: “Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya”.



Dua anak dengan disabilitas intelektual sedang belajar bersama di SD Inklusi Al-Ghazali |
foto: Raisa Adzraa

#5. Sekolah Inklusi dan Permasalahan Utama

Pemerintah seharusnya bisa menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang sama dan rata, dengan semangat inklusivitas. Peraturan tentang pendidikan inklusi ini juga sudah ada, yaitu Permendiknas nomor 70 tahun 2009 mengenai Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

Peraturan ini hadir agar orang dengan disabilitas dan non disabilitas dapat membaur dan berinteraksi dengan lugas tanpa merasa *kagok*. Sekolah inklusi ini juga hadir untuk mengurangi diskriminasi dan ketimpangan yang ada.

Shally Novita, Dosen Fakultas Psikolog Unpad juga meyakini bahwa pendidikan inklusi adalah konsep yang bagus. “Saya meyakini bahwa *approach* inklusi akan bisa berefek lebih baik kepada sebagian besar anak yang *learning disabilities* dibandingkan dengan yang spesial.” katanya.

Memang menghadirkan sekolah inklusi sangat sulit dan membutuhkan banyak usaha, karena harus mengantisipasi berbagai jenis orang dengan disabilitas yang butuh pendamping khusus.

Kesulitan ini terbukti di Jatinangor, diantara 72 sekolah umum, tidak satu pun sekolah yang mampu inklusi. Lembaga pendidikan di Jatinangor belum siap dengan hal ini, mulai dari anggaran, sumber daya, hingga infrastrukturnya yang tidak mendukung.

Hal ini juga dikonfirmasi oleh Dadang, Pengawas dan Pembina UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Jatinangor, bahwa Jatinangor tidak memiliki anak dengan disabilitas yang bersekolah di sekolah umum.

Tidak menerima orang dengan disabilitas di Sekolah umum ini bukan karena tidak mau, tetapi karena tidak mampu. Pemerintah harus memperhatikan hal ini, bukan regulasinya yang salah, tetapi pada institusi atau sekolahnya.

“Sekolah nya mau atau engga untuk mengoptimalkan guru-guru disana agar dapat juga mendampingi para penyandang disabilitas ini.” Kata Chloryne, ahli hukum Unpad.

Kerumitan pendidikan inklusi dan banyaknya hal yang harus disesuaikan membuat guru-guru di sekolah umum merasa terbebani, dengan sumber daya dan infrastruktur seadanya, serta kurangnya tenaga pengajar juga menjadi faktor mempersulit terjadinya pendidikan inklusi di Indonesia.

Sekolah inklusi memang program pemerintah yang baik dan harus didukung, namun hal yang harus dipikirkan adalah jangan sampai anak masuk ke sekolah umum tanpa pendamping, karena hal ini tidak tepat.

Di luar dari ini semua, hal yang utama adalah anak harus sekolah dan pemerintah wajib menyediakan akses ini.(***)

